

Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung

Roshida Qurota Aini Islamiah¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, I Ketut Winaya³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : roshiqurota31@gmail.com, andreas.noak@fisip.unud.ac.id,
winaya@fisip.unud.ac.id

ABSTRAK

Pergerakan aliran modal dan investasi yang meningkat dewasa ini akan berdampak pada semakin banyaknya pengguna tenaga kerja asing. Kabupaten Badung sebagai Kabupaten yang sangat pesat dalam hal pembangunan membuat Kabupaten Badung berpotensi untuk mendapat serbuan dan investor maupun dari tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja asing dilakukan mengingat masih adanya pelanggaran yang ditemukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan yaitu adanya pengguna tenaga kerja asing yang tidak melengkapi izin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penemuan menunjukkan pengawasan belum berjalan efektif. Hal ini karena petugas pengawas ketenagakerjaan secara kuantitas masih kurang, sulitnya mewawancarai pengguna tenaga kerja asing karena kurang tegasnya petugas pengawas ketenagakerjaan, dan sulitnya petugas pengawas dalam mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran sehingga membutuhkan pengaduan dari masyarakat setempat.

Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Pendahuluan

Pergerakan aliran modal dan investasi yang terjadi dewasa ini akan membuat perpindahan dan pergerakan tenaga kerja antar negara termasuk Indonesia semakin besar. Apalagi di akhir tahun 2015, Indonesia telah memasuki kawasan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dimana akibat adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ini akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.

Dewasa ini tenaga kerja asing menjadi kebutuhan dari perusahaan. Dimana perusahaan menganggap tenaga kerja asing memiliki *skill* dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Melihat adanya hal tersebut tentu akan berdampak pada semakin banyaknya perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang akan mengakibatkan tenaga kerja

Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja asing.

Salah satu Kabupaten di Bali yang banyak mempergunakan tenaga kerja asing adalah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang sangat pesat dalam hal pembangunan membuat Kabupaten Badung berpotensi untuk mendapat serbuan dari investor maupun tenaga kerja asing. Banyaknya tenaga kerja asing di Kabupaten Badung tersebut tentu membuat semakin banyak perusahaan – perusahaan yang akan mempergunakan tenaga kerja asing. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupten Badung berdasarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada tahun 2013-2015.

Tabel 1.1

**Jumlah Tenaga Kerja Asing di
Kabupaten Badung Berdasarkan
Penertiban Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Asing
2013	265 orang
2014	281 orang
2015	487 orang

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Sesuai dengan data diatas, jumlah tenaga kerja asing dari penerbitan IMTA diatas terlihat adanya peningkatan tenaga kerja asing dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan tenaga kerja asing dari 265 orang di tahun 2013 menjadi 281 orang tenaga kerja asing. Pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan tenaga kerja asing dari 281 orang di tahun 2014 menjadi 481 orang tenaga kerja asing. Dengan semakin banyaknya jumlah pengguna tenaga kerja asing yang bekerja tersebut, pengawasan yang ketat tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing.

Salah satu instansi yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan melihat syarat administrasi dari penggunaan tenaga kerja asing yaitu RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan surat penunjukkan pendamping tenaga kerja lokal.

Berdasarkan pemeriksaan dari petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung menemukan masih adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing. Pelanggaran tersebut antara lain masih adanya tenaga kerja asing yang tidak melengkapi izin kerja atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (sumber : hasil observasi wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan Kabupaten

Badung I Made Bawa, S.IP). Selain itu dalam pemberitaan Semeton News tertanggal 27 Maret 2016 mengungkapkan Kepala Dinsosnaker Kabupaten Badung IB Oka Dirga memperkirakan ada 1300 TKA yang bekerja di Badung. Akan tetapi di tahun 2015 hanya 481 orang pengguna tenaga kerja asing yang melakukan perpanjangan izin kerja. Adanya pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran tersebut membuat pengawasan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan sangatlah diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Namun dalam mengawasi pengguna tenaga kerja asing tersebut petugas pengawas ketenagakerjaan yang kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing membuat pengawas tidak dapat mengawasi seluruh pengguna tenaga kerja asing. Melihat adanya permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung?

Kajian Pustaka

1. New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) menurut Nawawi (2013 : 53) adalah adanya anggapan bahwa praktik manajemen pada sektor swasta lebih baik daripada praktik manajemen pada sektor tradisional. Sehingga untuk melakukan perbaikan kinerja dari sektor publik tersebut memerlukan adanya pengadopsian dari sektor swasta.

2. Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2015:92) adalah adanya hubungan antara *output* dengan tujuan sehingga kontribusi (sumbangan) *output* yang besar dalam pencapaian tujuan akan membuat semakin efektif suatu organisasi ataupun kegiatan. Pengertian efektivitas menurut Usman (2009:2) adalah tingkat berhasilnya tujuan dengan cara melakukan yang benar agar mampu mencapai tujuan dengan baik.

Indikator – Indikator Pengukuran Efektivitas

Menurut Gibson *et,al* (2012 : 15) ada indikator – indikator pengukuran efektivitas

dengan menggunakan tiga pendekatan dari efektifitas yaitu:

1. Pendekatan tujuan

Pendekatan tujuan merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh organisasi. Pendekatan ini menekankan organisasi ada untuk mencapai tujuan organisasi. Keefektifan organisasi dapat ditunjukkan dari tingkat prestasi organisasi. Dengan begitu evaluasi baik itu dari individu maupun kelompok organisasi harus terus dilakukan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Pendekatan sistem

Dalam pendekatan sistem terdapat salah satu unsur dari sejumlah elemen yang saling berinteraksi dalam suatu organisasi. Pendekatan sistem memandang bahwa suatu sistem secara keseluruhan memiliki beberapa sub – sub sistem yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Dimana sistem memiliki empat elemen dasar yaitu elemen *input*, proses, *output*, dan lingkungan. *Input* atau masukan merupakan segala sumber daya yang digunakan dalam organisasi untuk mendukung proses dalam upaya menghasilkan keluaran yang diharapkan. Proses merupakan kegiatan untuk mengolah *input* menjadi *output* yang mana pengertian *output* adalah hasil dari pengolahan *input* dan proses.

3. Pendekatan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Pendekatan ini mensinergikan antara pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini penting untuk mencapai keseimbangan antara berbagai bagian dari sistem dengan memuaskan kepentingan konstituen organisasi (individu dan kelompok individu yang memiliki kepentingan dalam organisasi).

3. Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Situmorang (1994:14) adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya agar tercapainya kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah guna menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Jenis – Jenis Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan jenis – jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Definisi pengawasan secara langsung adalah pengawasan secara "*in the spot*" dimana pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau pengawas. Sedangkan definisi pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara "*on the post*" dimana pengawasan ini dengan cara tidak langsung melalui laporan tertulis.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan ini berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan. Pengertian pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan definisi pengawasan represif merupakan pengawasan setelah selesai suatu kegiatan.

3. Pengawasan Intern dan pengawasan ekstern

Pengertian pengawasan intern adalah pengawasan yang ada di dalam organisasi yang didalamnya ada keterlibatan aparat. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang melibatkan aparat diluar organisasi.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan yaitu gabungan antara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penggabungan antara data primer dan data sekunder dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Adapun unit analisis penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dianalisis efektivitas pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung dan disesuaikan dengan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson *et*

,al (2012 :15) dengan menggunakan pendekatan sistem yang memberikan tiga indikator efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Input

Input atau masukan adalah semua sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung proses untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Indikator input yang dilihat dari penulis yaitu petugas pengawas ketenagakerjaan. Dalam posisi ini, petugas pengawas ketenagakerjaan mempunyai peran yang penting dalam melakukan pengawasan atas seluruh peraturan ketenagakerjaan.

Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung diawasi oleh petugas pengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Dimana ketersediaan petugas pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung masih kurang yaitu hanya dua orang petugas pengawas yang harus mengawasi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Melihat dari petugas pengawas yang kurang tentu hal ini sangat mempengaruhi pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Minimnya petugas pengawas ketenagakerjaan yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing tersebut akan mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan. Hal ini akan menyebabkan petugas pengawas ketenagakerjaan tidak dapat mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran. Jika jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak ditambah maka kegiatan pengawasan tidak dapat menyentuh seluruh pengguna tenaga kerja asing di Kabupaten Badung.

Jadi dapat dikatakan dari indikator input atau masukan dengan melihat petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada secara kuantitas masih belum cukup untuk mengimbangi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang diawasi.

2. Proses

Proses adalah kegiatan mengolah *input* menjadi *output*. Dari indikator proses peneliti melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan terhadap pengguna tenaga kerja asing.

Adapun instansi yang melaksanakan pengawasan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Badung yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Pengawasan ini dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan.

Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap pengguna tenaga kerja asing di Kabupaten Badung dilakukan melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung yaitu petugas pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan IMTA para pengguna tenaga kerja asing. Dari tahun 2010 hingga 2015 sebanyak 250 perusahaan pengguna tenaga kerja asing telah diawasi oleh petugas pengawas ketenagakerjaan. Namun dalam melakukan pengawasan secara langsung tersebut petugas pengawas ketenagakerjaan hanya dapat mengawasi beberapa perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Hal ini dikarenakan susah mencari waktu untuk mewawancarai pengguna tenaga kerja asing. Selain itu petugas pengawas ketenagakerjaan juga kurang tegas untuk memperoleh informasi dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing membuat pengawasan secara langsung ini tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung juga dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan yaitu dengan cara pengecekan IMTA yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Dengan pengecekan tersebut petugas pengawas dapat mengetahui data dari pengguna tenaga kerja asing seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, nama TKA, jangka waktu penggunaan TKA, dan pajak yang telah dibayarkan yang masuk dalam retribusi perpanjangan IMTA.

3. Output

Pengertian output adalah hasil dari pengolahan input dan proses. Penulis melihat indikator output dari hasil yang diperoleh petugas pengawas ketenagakerjaan setelah melakukan proses pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja asing berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja asing

yang menjadi output adalah laporan pelaksanaan tugas setelah selesai melaksanakan pengawasan.

Adanya laporan pelaksanaan tugas tersebut menandakan petugas pengawas ketenagakerjaan telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan kewajibannya mengawasi perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Namun apabila ada pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran aturan yang ada, output dari petugas pengawas yaitu berita acara pemeriksaan dan nota pemeriksaan yang berisikan pelanggaran perusahaan pengguna tenaga kerja asing sebagai penindakan dari pelanggaran yang dilakukan.

Tidak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap Pengguna Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing maka pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan suatu tindakan yang sebelumnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan tersebut berisikan teguran dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran. Apabila dalam pembinaan tersebut pengguna tenaga kerja asing masih melakukan pelanggaran maka petugas pengawas akan mengeluarkan berita acara pemeriksaan dan dilanjutkan dengan nota pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan isinya menyatakan adanya suatu pelanggaran dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing sangatlah diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing menurut petugas pengawas ketenagakerjaan yaitu pada bulan Januari 2015 didapati pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja asing yaitu PT. Esc Urban Food Station atau yang dikenal dengan nama Sky Garden. Dimana pelanggaran yang dilakukan yaitu tenaga kerja asing yang mereka pekerjakan masih ada yang tidak memiliki izin kerja selain itu tenaga kerja asing yang merupakan pimpinan mereka melakukan tindakan semena – mena dengan melakukan

pemukulan dan pemecatan terhadap karyawan, memotong THR, dan pemecatan karyawan. Mendapati adanya pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran tersebut petugas pengawas ketenagakerjaan langsung melakukan teguran keras. Dari petugas pengawas ketenagakerjaan meminta agar perusahaan segera mengurus izin kerja karena jika tidak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi agar TKA yang melanggar tersebut di deportasi.

Permasalahan yang ditemui yaitu petugas pengawas ketenagakerjaan saat melakukan penindakan terhadap pengguna tenaga kerja asing yaitu dari petugas pengawas tidak dapat mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tidak mudah untuk mencari pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran kecuali adanya pengaduan dari masyarakat setempat atau pada saat dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sulitnya petugas pengawas ketenagakerjaan dalam mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran tentu akan membuat penindakan terhadap pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran tidak dapat dilakukan. Sehingga petugas pengawas ketenagakerjaan tidak dapat mengetahui ketaatan aturan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

Kesimpulan

Terkait pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap pengguna tenaga kerja asing, dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan masih belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan ketersediaan petugas pengawas secara kuantitas masih kurang yaitu hanya dua orang petugas pengawas. Minimnya petugas pengawas yang ada tentu akan mempengaruhi pengawasan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing secara keseluruhan. Dimana peran dari petugas pengawas sangatlah diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Apalagi setiap tahunnya perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya kurang tegasnya petugas pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pengguna tenaga kerja asing juga membuat pengawasan belum dapat dilakukan

secara optimal. Sehingga petugas pengawas ketenagakerjaan tidak dapat mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran kecuali adanya pengaduan dari masyarakat setempat apabila melihat adanya pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Ajis, Keling, Othman, Shuib. (2014), :*"The Dilemma of Managing Foreign Workers in Malaysia : Opportunities and Challenges"*, Global Journal of Human Social Science.
- Ajis, Saludin, Ismail, Feigenblatt, Shuib, Keling. (2010), : *"Managing Foreign Workers in Southeast Asian Countries"*, Journal of Asia Pacific Studies (2010) Vol 1, No 3, 481-505.
- Gibson, James.L., John M. Ivancevish, James H. Donnelly Jr, Robert Kenopaske. 2012. *Organizations : Behavior, Structure, Process. Fourteenth Edition*. New York : Business Unit of The McGraw-Hill Companies INC
- Icli, Sever. (2012), :*"Foreign Workers without Work Permit in Istanbul: A Sociological Study"*, Scientific Research
- Kartasapoetra. (1992). *Hukum Perburuahan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Maimun. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Manullang. (2006). *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik :Edisi Ketiga*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Nawawi. (2013). *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Paslong, Harbani. (2002). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung : ALFABETA
- Sule, Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Jakarta : Prenada Media.
- Situmorang & Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sujamto. (1994). *Aspek Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunindhia, Widiyanti. (1987). *Manajemen Tenaga Kerja*, Jakarta : Bina Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Tompubolon. (2015) : *"Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siduarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3"*, Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga.
- Usman Husaini. (2011). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Windy. (2015) : *"Implementasi Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi di Kabupaten Lombok Barat"*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.

Dokumen Internet :

www.semetonnews.com/post/read/489/ribuan-tka-di-badung-belum-kantongi-izin, 2016, Ribuan TKA di Badung Belum Kantongi Izin. Di Unduh 26 April 2016 jam 01.00 WITA

Dokumen Perundang –Undangan:

Undang – Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.30 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.